



Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dimas Adijaya Nugraha^{1*}, I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari²

¹⁻²Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia

dimasadi9865@gmail.com¹, apsarianandari@unud.ac.id²

*Penulis Korespondensi: dimasadi9865@gmail.com

Abstract. *Regional economic growth is a key indicator of development success aimed at improving public welfare. Bali Province generally demonstrates a positive trend in economic growth; however, it continues to experience disparities in growth among regencies and municipalities, where the Sarbagita area tends to grow more rapidly than other regions due to differences in economic structure and fiscal capacity. This condition indicates that the utilization of regional revenue sources has not been fully optimized to promote equitable economic growth. This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU), and Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus/DAK) on economic growth in regencies and municipalities in Bali Province during the period 2014–2024. The method employed is panel data regression analysis with a significance level of 5 percent. The results indicate that PAD, DAU, and DAK simultaneously have a significant effect on regional economic growth. Partially, PAD and DAU have a positive and significant effect on economic growth, while DAK does not show a significant effect, indicating that the utilization of DAK has not been optimal in stimulating regional economic activity. These findings emphasize the importance of strengthening fiscal independence through the optimization of PAD, more effective and productive management of DAU, and improvements in the planning and implementation of DAK to ensure a tangible contribution to sustainable and equitable economic growth in Bali Province.*

Keywords: DAK; DAU; Economic Growth; Fiscal Independence; PAD

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Bali secara umum menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, namun masih menghadapi fenomena ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota, di mana wilayah Sarbagita cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014–2024. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan DAK belum mampu secara optimal mendorong aktivitas ekonomi daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pengelolaan DAU yang lebih efektif dan produktif, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan DAK agar dapat berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Provinsi Bali.

Kata kunci: DAK; DAU; Kemandirian Fiskal; PAD; Pertumbuhan Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Salah satu faktor yang diyakini berperan besar dalam mendukung proses tersebut adalah pendapatan daerah, yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah

dalam membiayai program pembangunan. Kegiatan perekonomian adalah penggunaan atas variabel produksi demi menciptakan output, oleh sebab itu dalam prosedur ini berhubungan menciptakan distribusi sumbangsih atas variabel produksi yang dimiliki (Kusumawati, 2020). Pertumbuhan ekonomi menjadi cerminan seberapa pengaruh dari kegiatan perekonomian akan mendapatkan balas jasa atau pendapatan dalam batas waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan perekonomian di suatu daerah. Berkembangnya kegiatan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian (Dewi, 2024). Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Upaya dari komposisi tercatat, pendapatan adalah salah satu yang sungguh

fundamental dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, nantinya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan serta melakukan penguatan pada proses sumber daya vital yang tersedia dan menambah kerja sama kepada masyarakat baik berperan menjadi investor yang mana bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru atau pekerja selaku salah satu komponen untuk kegiatan produksi yang nantinya akan berdampak dalam aktivitas ekonomi untuk daerah tersebut. Pembangunan pada suatu daerah memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dikatakan baik jika menemui pertumbuhan ekonomi yang memiliki kualitas yaitu pertumbuhan yang dapat melahirkan penghasilan yang merata, mengentaskan kemiskinan, maka hal itu mencerminkan kesejahteraan meningkat (UNDP, 2019).

Jika sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menurun atau pertumbuhan ekonomi bernilai negatif maka kesejahteraan menurun. Dalam usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah maka faktor modal adalah faktor penting dan mendasar serta sangat di butuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan sebagaimana masyarakat agar pemerintah dapat segera bergerak untuk menggerakkan faktor perekonomian (Nisa, 2017). Pertumbuhan ekonomi pada daerah di ukur sebagaimana menggunakan PDRB atau produk domestik regional bruto. Totalitas dari perkembangan barang dan jasa pada suatu daerah bisa dikatakan sebagai PDRB dan perhitungan persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah memakai PDRB sebagaimana menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (Kusumawati, 2020).

Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Provinsi Bali. Meskipun secara umum Provinsi Bali menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan antar

wilayah. Daerah-daerah yang tergabung dalam kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena dominasi sektor pariwisata, sementara kabupaten lainnya seperti Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana masih tertinggal (BPS Provinsi Bali, 2023). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata, dan terdapat perbedaan kapasitas fiskal serta pemanfaatan pendapatan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dalam konteks teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1990), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh faktor internal, termasuk kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan fiskalnya. Namun, sejauh mana pendapatan daerah – khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) – mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Bali belum banyak dikaji mendalam.

Adapun perbedaan penelitian terhadap penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan lokasi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali dengan tahun penelitian terbaru hingga dan menyeluruh dari 2014-2024, serta melihat adanya keterbatasan pada penelitian terdahulu pada penggunaan variabel penelitian sehingga menggabungkan penggunaan variabel PAD, DAU, dan DAK sebagai variabel dalam penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian kembali untuk memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Provinsi Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian, di mana sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak lokal seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan kendaraan bermotor. Beberapa studi mengonfirmasi bahwa faktor-faktor pariwisata sangat berpengaruh terhadap PAD Bali menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik secara signifikan memengaruhi PAD Bali (Anggreni dan Budiasih, 2023). Sementara sektor pariwisata meliputi jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, serta PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD daerah di Bali (Ariani & Utama, 2024).

Ketergantungan tinggi terhadap pariwisata juga menjadikan PAD Bali sangat rentan terhadap perubahan situasi global. Dampaknya terlihat jelas selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021, saat pembatasan sosial dan menurunnya kunjungan wisatawan menyebabkan penurunan drastis PAD. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2022 seiring bangkitnya pariwisata dan transportasi struktur PAD yang belum terdiversifikasi telah menimbulkan tantangan serius terkait stabilitas fiskal daerah.

Menempatkan masalah tersebut dalam konteks rumusan masalah penelitian, gejala dominasi parsial pajak pariwisata ini menggiring Bali pada pola penerimaan yang sangat terfokus dan ekstrem memerlukan strategi diversifikasi dan penguatan sumber penerimaan alternatif ke depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Bali selama periode 2014–2024. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya meliputi PAD, DAU, dan DAK. Data yang digunakan berupa data panel, yaitu gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data lintas wilayah (*cross section*) yang mencakup delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali. Pemilihan periode penelitian didasarkan pada ketersediaan data yang relatif lengkap serta dinamika ketimpangan fiskal dan ekonomi antarwilayah, khususnya antara kawasan Sarbagita dan daerah non-Sarbagita. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Gujarati, 2003; Sugiyono, 2019; BPS Provinsi Bali, 2024).

Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Keseluruhan wilayah ini dipilih untuk mencerminkan variasi kondisi fiskal dan ekonomi daerah, di mana beberapa daerah memiliki kapasitas pendapatan daerah yang tinggi akibat dominasi sektor pariwisata, sementara daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam optimalisasi PAD dan pemanfaatan dana transfer pusat. Objek penelitian difokuskan pada variabel-variabel fiskal daerah yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu PAD sebagai sumber pendapatan mandiri daerah, DAU sebagai instrumen pemerataan fiskal, dan DAK sebagai dana yang ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan tertentu (BPS Provinsi Bali, 2024; DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024)

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pengujian statistik meliputi uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan uji t bertujuan menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual. Koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut. Seluruh

pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen untuk memastikan keandalan hasil analisis dan validitas kesimpulan penelitian (Wirawan, 2017; Sugiyono, 2019; Gujarati, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kondisi Geografis, Iklim dan Demografi



Gambar 1. Peta Provinsi Bali

Sumber: Google Map, 2025

Pulau Bali merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Provinsi Bali merupakan terbagi atas delapan kabupaten dan satu kota. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Bali tercatat sebanyak 4.317.404 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 791.813 jiwa, diikuti oleh Kota Denpasar dengan jumlah penduduk sebesar 725.314 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 206.925 jiwa.

Tabel 1. Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin, di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (orang)			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan per km ²
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah		
Jembrana	841,80	158,730	158,334	317,064	100,25	377
Tabanan	1 013,88	231,448	230,182	461,630	100,55	455
Badung	418,62	274,577	273,614	548,191	100,35	1,310
Gianyar	368,00	258,455	256,889	515,344	100,61	1,400
Klungkung	315,00	103,657	103,268	206,925	100,38	657
Bangli	490,71	130,307	128,414	258,721	101,47	527
Karangasem	839,54	249,495	242,907	492,402	102,71	587
Buleleng	1 364,73	398,135	393,678	791,813	101,13	580
Denpasar	127,78	366,301	359,013	725,314	102,03	5,676
Prov. Bali	5 780,06	2,171,105	2,146,299	4,317,404	101,16	747

Sumber: Data Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS Provinsi Bali 2025)

Dari segi kepadatan penduduk, wilayah yang paling padat adalah Kota Denpasar, dengan kepadatan 5.676 jiwa per km², kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar dengan kepadatan 1.400 jiwa per km². Penduduk yang paling jarang terdapat di Kabupaten Jembrana, yaitu sebanyak 377 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu dengan rasio 103 (dibulatkan). Artinya setiap 100 orang penduduk Wanita, terdapat 103 orang penduduk laki.

Gambaran Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tabel 2. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	0,35	0,32	0,32	0,326	0,2884
2	Tabanan	0,32	0,31	0,35	0,347	0,3007
3	Badung	0,31	0,33	0,31	0,28	0,2808
4	Gianyar	0,32	0,33	0,29	0,317	0,286
5	Klungkung	0,36	0,34	0,35	0,338	0,3071
6	Bangli	0,28	0,28	0,28	0,282	0,3021
7	Karangasem	0,33	0,31	0,30	0,337	0,2833
8	Buleleng	0,28	0,28	0,28	0,314	0,2785
9	Denpasar	0,33	0,37	0,37	0,342	0,3413
Provinsi Bali		0,37	0,38	0,38	0,362	0,3611

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

Nilai Gini Ratio Provinsi Bali berada pada kisaran 0,37–0,38 selama tahun 2020–2022, kemudian sedikit menurun menjadi 0,362 pada tahun 2023 dan 0,3611 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan pasca-pandemi COVID-19, seiring dengan pemulihan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang kembali menggeliat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan masih terlihat cukup mencolok antarwilayah. Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung tercatat memiliki nilai Gini Ratio tertinggi, masing-masing 0,3413 dan 0,3071 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah perkotaan dan kepulauan kecil masih menjadi tantangan. Ketimpangan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang tidak merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, meskipun perekonomian Bali menunjukkan tren pertumbuhan positif, pemerataan hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran ringkas mengenai karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi tiap variabel. Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan variasi yang sangat tinggi, dengan nilai rata-rata 787,21 miliar dan standar deviasi 1.326,85, menandakan fluktuasi PAD yang lebar antarperiode. Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) juga berfluktuasi, dengan rata-rata masing-masing 641,22 miliar dan 172,94 miliar, meskipun tingkat variasinya relatif lebih terkendali dibandingkan PAD. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi (Y) bergerak dari kontraksi hingga ekspansi, dengan rata-rata 3,72 persen, mencerminkan dinamika kondisi ekonomi yang berubah-ubah setiap tahunnya.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	99	55,20	6791,52	787,2105	1326,85209
Dana Alokasi Umum (X2)	99	286,76	1030,12	641,2221	174,99230
Dana Alokasi Khusus (X3)	99	5,23	998,17	172,9432	115,05926
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	99	-16,55	11,29	3,7208	4,42307
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Olah data, 2025.

Hasil Statistik

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-52,360	5,297		-9,885	.000
1 Pendapatan Asli Daerah (X1)	1,716	.279	.436	6,156	.000
Dana Alokasi Umum (X2)	7,519	.716	.722	10,503	.000
Dana Alokasi Khusus (X3)	-.475	.401	-.082	-1,184	.239

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Olah data, 2025.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4 maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \ln\beta_1 X_1 + \ln\beta_2 X_2 + \ln\beta_3 X_3 + e$$

$$\hat{Y} = -52,360 + 1,716X_1 + 7,519X_2 - 0,475X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

- Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar -52,360 dengan tanda negatif yang menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi

khusus (X3) dianggap konstan, maka nilai Y atau pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. bernilai sebesar -52,360.

- b. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X1) adalah sebesar 1,716 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan 1 persen, dengan variabel dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus (X3) dianggap konstan , maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 1,716 persen. Sebaliknya, apabila pendapatan asli daerah (X1) mengalami penurunan 1 persen, namun variabel lainnya bernilai konstan (0), maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 1,716 persen.
- c. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum (X2) adalah sebesar 7,519 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila dana alokasi umum (X2) mengalami peningkatan 1 persen, namun variabel pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi khusus (X3) bernilai konstan (0), maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 7,519 persen. Sebaliknya, apabila dana alokasi umum (X2) mengalami penurunan 1 persen, namun variabel lainnya bernilai konstan (0), maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 7,519 persen.
- d. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus (X3) adalah sebesar -0,475 dengan tanda negatif menyatakan bahwa apabila dana alokasi khusus (X3) mengalami penurunan 1 persen, namun variabel pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2) bernilai konstan (0), maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 0,475 persen. Sebaliknya, apabila dana alokasi khusus (X3) mengalami peningkatan 1 persen, namun variabel lainnya bernilai konstan (0), maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar sebesar 0,475 persen.

Hasil Uji Asumsi Klasik

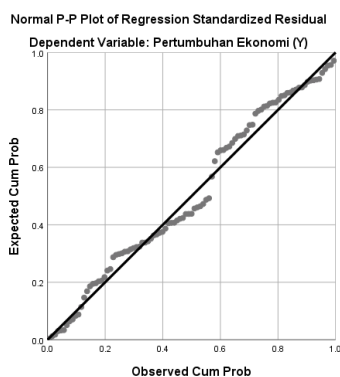
Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	99
Test Statistic	0,073
Exact Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Olah data, 2025.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari uji *Kolmogorov-Smirnov Test* sebesar 0,200 yang di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, residual model berdistribusi secara normal, maka model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot (P-P Plot)

Selain itu, hasil P-P Plot pada Gambar 2 juga mendukung kesimpulan tersebut, di mana titik-titik residual tersebar mengikuti garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi residual tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam regresi linier berganda telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,897	1,115	Tidak terjadi multikolonieritas
2.	Dana Alokasi Umum (X2)	0,954	1,049	Tidak terjadi multikolonieritas
3.	Dana Alokasi Khusus (X3)	0,934	1,070	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Olah data, 2025

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel pendapatan asli daerah (0,897), dana alokasi umum (0,954) dan dana alokasi khusus (0,934). Semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$. Nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas yaitu variabel pendapatan asli daerah (1,115), dana alokasi umum (1,049) dan dana alokasi khusus (1,070). Semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 . Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah korelasi antar variabelnya.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,108	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2.	Dana Alokasi Umum (X2)	0,058	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3.	Dana Alokasi Khusus (X3)	0,092	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Olah data, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel bebas yaitu variabel pendapatan asli daerah (0,108), dana alokasi umum (0,058), dan dana alokasi khusus (0,092). Dari hasil tersebut setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian (*goodness of fit*) dari suatu model regresi, yaitu sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (Utama, 2021). Nilai Koefisien Determinasi (R^2) menggambarkan proporsi total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan secara simultan oleh seluruh variabel bebas. Dalam penelitian ini, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,572 menunjukkan bahwa sebesar 57,2 persen variasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3). Sementara itu, sisanya sebesar 42,8 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,756 ^a	0,572	0,558	2,94025

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Alokasi Umum (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Olah data, 2025.

Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1095,946	3	365,315	42,257	.000 ^b
	Residual	821,284	95	8,645		
	Total	1917,229	98			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Alokasi Umum (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Sumber: Olah data, 2025

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel $0,000 < 0,05$ dan $42,257 > 2,703$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus (X3) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

Uji Signifikan Koefisien Secara Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus (X3) secara parsial terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, variabel pendapatan asli daerah (X1) dan variabel dana alokasi umum (X2) bahwa *reject* H_0 , yang artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Sedangkan untuk dana alokasi khusus (X3) menunjukkan hasil *reject* H_1 , yang artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2014-2024

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 9, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai F-hitung sebesar 42,257 yang lebih besar dari F-tabel 2,703, sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2014–2024. Secara ekonomi, PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, sedangkan DAU dan DAK berperan sebagai instrumen transfer fiskal untuk mendukung belanja pemerintahan, infrastruktur, dan layanan publik strategis. Dukungan fiskal tersebut berkontribusi pada pembentukan modal fisik, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, besarnya pengaruh tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila pengelolaan PAD, DAU, dan DAK dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 8, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,156 yang lebih besar dari t-tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja pembangunan produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. PAD juga mencerminkan kemandirian fiskal daerah karena bersumber dari potensi ekonomi lokal yang dapat dikelola secara otonom. Dengan demikian, optimalisasi PAD menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 8, diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,503 yang lebih besar dari t-tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014–2024. Besarnya nilai t-hitung menandakan bahwa DAU merupakan salah satu variabel dominan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara empiris, DAU berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Dengan demikian, efektivitas dan ketepatan pemanfaatan DAU menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 8, diperoleh nilai t-hitung sebesar $-1,184$ yang lebih kecil dari t-tabel 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,239 ($> 0,05$), sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2014–2024. Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa meskipun DAK berperan dalam pembiayaan sektor-sektor prioritas, sifatnya yang spesifik dan terikat membatasi fleksibilitas daerah sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi makro belum terlihat secara langsung. Selain itu, kemungkinan adanya keterlambatan penyaluran, kendala teknis,

serta efektivitas pelaksanaan program turut memengaruhi lemahnya kontribusi DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan DAK agar ke depan dana ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. Secara parsial, variabel PAD dan DAU terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Nilai t hitung PAD sebesar 6,156 dan DAU sebesar 10,503, keduanya dengan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan DAU secara nyata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana nilai t hitung sebesar -1,184 dan signifikansi 0,239 menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua komponen keuangan daerah secara langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tergantung pada efektivitas pengelolaan dan karakteristik dana tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Andiani, L., Sudiarto, E., Lusiana, & Salesti, J. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan saat terjadi pandemi (Pada Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018–2021). *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 215–220.
- Anggreni, N. M., & Budiasih, I. G. A. N. (2023). Pengaruh kunjungan wisatawan domestik terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 18(2), 45–57.
- Anjelina, P., Zamzami, & Nurhayani. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 7(2). <https://doi.org/10.22437/pim.v7i2.13099>
- Anwar. (2016). *Dana alokasi umum dan pemerataan fiskal*. Kementerian Keuangan RI.
- Ariani, I. G. A., & Utama, I. M. S. (2024). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 12(1), 22–34.
- Ariefiantoro, T., & Saddewisasi, W. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55–68.

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali dalam angka 2023*. BPS Provinsi Bali.
- Dewi, N. L. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 15(1), 10–21.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. (2023). *Data transfer ke daerah*. Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota 2020–2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eliza, E. (2015). Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 150–158.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EvIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Kusmiyadi, A., & Sugiantoro, M. (2000). *Metode penelitian ekonomi*. Alfabeta.
- Kusumawati, A. (2020). Peran pendapatan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(1), 77–89.
- Lestari, N., & Putra, G. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 101–112. <https://doi.org/10.35194/ee.v2i1.2013>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nisa, S. (2017). Modal dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 45–54.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permana, R. D. (2021). Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.293>
- Prasetyo, A. (2018). Efektivitas dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 6(2), 56–67.
- Rahmawati, T., & Rahayu, E. (2019). Pengaruh dana alokasi umum terhadap pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–40.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3–22. <https://doi.org/10.1257/jep.8.1.3>

- Rori, F. (2016). Pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 55–66.
- Rosita, S. (2024). Peran dana alokasi khusus dalam pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 88–97.
- Saputra, D., & Ningsih, Y. (2021). Dampak DAK pada sektor produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 9(2), 112–123.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Smith, A. (2005). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (Original work published 1776).
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Sriyana, J. (2011). Kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 45–54.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. Raja Grafindo Persada.
- Supartoyo, & Tathoh, H. (2013). Pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dengan PDRB. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(1), 66–78.
- Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Utami, W. (2020). Analisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(1), 23–35.
- Wahyudi, R. (2020). Peran PAD dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 56–69.
- Widarwanto, E. (2014). Dana alokasi khusus dan pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 22–30.
- Wirawan, I. (2017). *Statistik untuk penelitian sosial dan ekonomi*. Rajawali Pers.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th ed.). Cengage Learning.